

DAMPAK INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL DI PROVINSI JAMBI

Mutiara Farah Syifa¹
Universitas Muhammadiyah Jambi¹
mutiarafs19@gmail.com¹
Irmanelly²
Universitas Muhammadiyah Jambi²
73irmanelly@gmail.com²
Asrini³
Universitas Muhammadiyah Jambi³
asrini.msa@gmail.com³

ABSTRAK

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam dunia kerja merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Tingginya daya serap tenaga kerja tidak hanya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membantu menekan angka pengangguran. Dua faktor yang diyakini memberi kontribusi besar dalam proses ini adalah investasi serta pengeluaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana investasi dan belanja pemerintah berdampak pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor di Provinsi Jambi selama periode tahun 2020–2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan sifat asosiatif kausal. Dalam hal ini, tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral ditetapkan sebagai variabel dependen, sementara variabel independennya mencakup investasi dan pengeluaran pemerintah. Penelitian memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari BPS serta lembaga pemerintah terkait. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda dengan dukungan perangkat lunak SPSS. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa secara simultan, investasi dan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Namun, secara parsial, investasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pengeluaran pemerintah meski positif, tidak signifikan. Artinya, investasi memiliki peranan lebih dominan dibandingkan belanja pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan daerah disarankan untuk mendorong realisasi investasi sekaligus menyalurkan anggaran pada sektor padat karya demi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi.

Kata kunci: Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral, Provinsi Jambi

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ukuran keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kemampuan

suatu negara dalam menyelesaikan beragam persoalan yang muncul. Salah satu masalah krusial yang masih dihadapi banyak wilayah di Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran. Karena itu, penyerapan tenaga kerja menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk yang terserap dalam pasar kerja, semakin kecil tingkat pengangguran yang terjadi, sekaligus semakin besar pula peran sektor ekonomi dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif (1).

Penyerapan tenaga kerja dapat dipahami sebagai situasi ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja berhasil memperoleh pekerjaan sesuai peran serta tanggung jawabnya. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang kerja yang bisa diisi oleh pencari kerja dengan menyesuaikan keterampilan serta kompetensi yang dimiliki. Oleh sebab itu, diharapkan kelompok usia produktif, terutama kalangan muda, mampu terlibat dan berkontribusi secara aktif dalam dunia kerja.

Penyerapan tenaga kerja juga dapat dipahami sebagai total kesempatan kerja yang telah diisi, yang terlihat dari jumlah angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Pekerja tersebut tersebar pada beragam sektor perekonomian sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu, besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja bergantung pada berbagai faktor yang menentukan permintaan terhadap tenaga kerja itu sendiri (2).

Dari sekian banyak faktor yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di tingkat sektoral, investasi serta pengeluaran pemerintah memegang posisi yang sangat penting. Investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), berperan besar dalam mendorong produktivitas sektor ekonomi, memperbesar kapasitas produksi, sekaligus membuka kebutuhan akan tenaga kerja baru. Di sisi lain, belanja pemerintah, khususnya pengeluaran yang bersifat produktif seperti belanja modal, juga memberikan kontribusi signifikan melalui terciptanya kegiatan ekonomi padat karya. Dampak tersebut bisa muncul secara langsung lewat pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, maupun secara tidak langsung melalui efek pengganda yang timbul dari meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa.

Provinsi Jambi sebagai salah satu wilayah di Sumatera yang memiliki potensi ekonomi dari sektor perkebunan, pertambangan, dan industri, masih menghadapi tantangan dalam penyerapan tenaga kerja secara optimal. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jambi mengalami tren positif dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka masih menunjukkan angka yang relatif fluktuatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana investasi dan pengeluaran pemerintah berperan dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

Investasi atau akumulasi stok modal dipandang sebagai elemen krusial dalam menentukan besarnya pendapatan nasional. Sukirno (3) menjelaskan bahwa investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Prasajo (4) menegaskan bahwa investasi yang ditanamkan dalam suatu perekonomian akan menghasilkan pembentukan barang modal baru, yang selanjutnya menyerap faktor-faktor produksi, menciptakan lapangan kerja, serta secara perlahan menurunkan tingkat pengangguran.

Kusuma menjelaskan bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu wujud campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi yang berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan. Dalam konteks pemerintah daerah, peningkatan belanja publik diyakini mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui stimulus terhadap berbagai sektor kegiatan ekonomi (5). Menurut Sukirno (dalam Danawati, dkk), pengeluaran pemerintah mencakup konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka membiayai kebutuhan administratif negara serta mendukung berbagai program pembangunan (6). Menurut Butkiewicz dan Yanikkaya (7), pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan modal merupakan bentuk investasi yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, belanja publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sering kali belum mampu menyentuh lapisan masyarakat secara merata. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran antar wilayah kabupaten/kota. Padahal, seharusnya dana tersebut dialokasikan secara strategis agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum yang memadai.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh investasi dan belanja pemerintah terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif di Provinsi Jambi.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta analisis asosiatif kausal. Fokus utamanya adalah menelaah bagaimana investasi dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor perekonomian di Provinsi Jambi sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kemampuannya dalam mengukur keterkaitan antar variabel numerik, sekaligus menilai pengaruh yang muncul baik secara parsial maupun simultan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berbentuk time series selama kurun waktu 2020–2024. Menurut Algifari, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak ketiga atau sumber tidak langsung, biasanya tersedia dalam dokumen resmi maupun laporan lembaga terkait (8). Adapun data yang dipakai mencakup jumlah tenaga kerja yang terserap di Provinsi Jambi, dilengkapi dengan distribusi tenaga kerja berdasarkan sektor sebagai informasi penunjang, serta data mengenai realisasi investasi dan pengeluaran pemerintah pada periode penelitian. Sumber utama pengumpulan data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan publikasi resmi lainnya yang relevan.

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Model umum dari analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penyerapan Tenaga Kerja

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Variabel Investasi (X_1)

β_2 = Koefisien Regresi Variabel Pengeluaran Pemerintah (X_2)

e = Error Term

HASIL

1. Analisis Deskriptif Data

Tabel 1.
Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral
di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Investasi (PMDN dan PMA)	Pengeluaran Pemerintah	Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral
2020	3.900.007.760	5.244.899.000	1.739.003
2021	6.946.719.390	4.388.299.688	1.746.840
2022	9.445.213.040	4.772.689.354	1.797.819
2023	9.606.186.080	5.175.212.402	1.802.264
2024	11.570.714.930	5.178.334.014	1.833.267

Sumber: Data BPS Provinsi Jambi

Tabel 1 menampilkan informasi mengenai perkembangan investasi, belanja pemerintah, serta penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Jambi sepanjang periode 2020–2024. Dari data tersebut terlihat bahwa nilai investasi menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp11.570.714.930, sedangkan nilai terendah berada pada tahun 2020 sebesar Rp3.900.007.760. Kenaikan tersebut mencerminkan semakin baiknya iklim investasi di Provinsi Jambi sehingga mampu menarik minat investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Sementara itu, pengeluaran pemerintah menunjukkan fluktuasi sepanjang periode yang diamati, di mana pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp5.244.899.000 namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp4.388.299.688. Setelah itu, nilainya kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp5.178.334.014. Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika kebijakan fiskal

daerah serta dampak kondisi eksternal, seperti pandemi Covid-19, yang berpengaruh pada kemampuan fiskal pemerintah daerah (9).

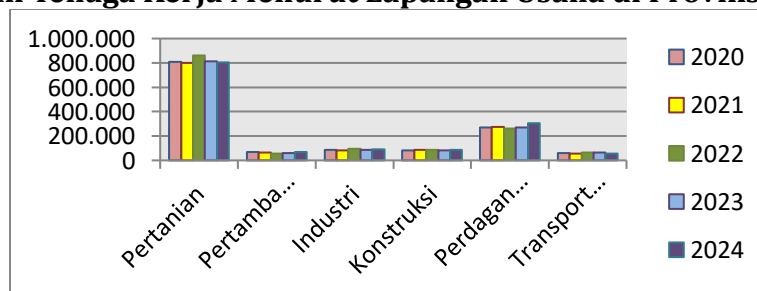
Dari aspek penyerapan tenaga kerja sektoral, terlihat adanya pertumbuhan yang positif dan cukup konsisten sepanjang periode penelitian. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang bekerja tercatat sebanyak 1.739.003 orang, kemudian naik menjadi 1.797.819 orang pada tahun 2022, hingga akhirnya mencapai 1.833.267 orang pada tahun 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya dorongan dari meningkatnya aktivitas perekonomian daerah, baik yang bersumber dari investasi maupun dari pelaksanaan program-program pemerintah (10).

Secara keseluruhan, data dalam tabel ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Jambi, meskipun pengeluaran pemerintah tidak selalu bergerak searah dengan investasi dan penyerapan tenaga kerja sektoral.

2. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral (Deskriptif)

Distribusi tenaga kerja menurut sektor ekonomi di Provinsi Jambi pada periode 2020–2024 memperlihatkan adanya variasi yang cukup signifikan antar sektor. Grafik yang disajikan menampilkan jumlah pekerja yang terserap pada enam sektor utama, yakni pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, serta transportasi.

Grafik 1.
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi



Sumber: Data BPS Provinsi Jambi, diolah peneliti

Mengacu pada Grafik 1, dapat dilihat bahwa sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sepanjang periode 2020–2024. Jumlah pekerja di sektor ini tetap mendominasi, meskipun sejak 2023 mengalami sedikit penurunan. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, sektor pertanian dikategorikan memiliki keunggulan kompetitif serta menunjukkan spesialisasi, baik dari kontribusinya terhadap PDRB maupun dari tingkat keterlibatan tenaga kerja, sehingga menegaskan posisinya sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian (11). Sementara itu, sektor perdagangan memperlihatkan tren peningkatan setiap tahun, mencerminkan perkembangan sektor jasa dan aktivitas perniagaan, khususnya pada skala UMKM.

Jumlah tenaga kerja pada sektor industri dan konstruksi terlihat relatif stabil, namun skalanya masih lebih kecil dibandingkan dengan sektor pertanian maupun perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut belum memberikan perkembangan yang berarti dalam penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, sektor pertambangan dan transportasi menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih terbatas, dengan pola penyerapan yang berbeda, di mana pertambangan bersifat fluktuatif sedangkan transportasi cenderung mengalami peningkatan secara bertahap.

Secara keseluruhan, sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan perdagangan masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi, sedangkan sektor padat modal seperti industri dan pertambangan belum memberikan kontribusi besar dalam aspek ketenagakerjaan.

3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda (SPSS)

Tabel 2. Hasil Regresi Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.193	.420		9.987
					.010

	INVESTASI	.047	.007	.871	6.343	.024
	PENGELUARAN PEMERINTAH	.164	.042	.538	3.915	.059
a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL						

Persamaan regresi pada tabel di atas adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 4,193 + 0,047X_1 + 0,164X_2 + e$$

Yang berarti bisa dijelaskan:

1. Diketahui Nilai Konstanta sebesar 4,193 berarti bahwa jika selama tahun 2020-2024 variabel X_1 , X_2 (Investasi, Pengeluaran Pemerintah) dianggap konstan atau tidak ada atau nol maka Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral (Y) di Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 4,193%.
2. Diketahui koefisien Investasi (X_1) sebesar 0,047 artinya jika variable Investasi (X_1) naik 1% dan variabel Pengeluaran Pemerintah (X_2) dianggap konstan atau tidak ada atau nol maka Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral di Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 0,047%.
3. Diketahui koefisien Pengeluaran Pemerintah (X_2) sebesar 0,164 artinya jika variabel Pengeluaran Pemerintah (X_2) naik 1% dan variabel Investasi (X_1) dianggap konstan atau tidak ada atau nol maka Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral di Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 0,164%.

Diketahui t tabel di dapatkan ($DF = N - K - 1$) ($DF = 5 - 2 - 1 = 2$) yaitu 2,919

1. Variabel X_1 (Investasi)

Diketahui t hitung variabel X_1 (Investasi) yaitu sebesar 6,343% dan Nilai t tabel sebesar 2,919, karena t hitung lebih besar daripada t tabel ($6,343 > 2,919$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 (Investasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral) di Provinsi Jambi, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima.

2. Variabel X_2 (Pengeluaran Pemerintah)

Diketahui t hitung variabel X_2 (Pengeluaran Pemerintah) yaitu sebesar 3,915% dan Nilai t tabel sebesar 2,919, karena t hitung lebih besar daripada t tabel ($3,915 > 2,919$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_2

(Pengeluaran Pemerintah) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y (Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral) di Provinsi Jambi, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Analisis parsial menunjukkan bahwa variabel investasi memberikan dampak yang positif sekaligus signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral. Hasil ini konsisten dengan hipotesis awal dan mendukung temuan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian oleh Todaro & Smith (12) yang menegaskan bahwa investasi berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan sektor industri maupun jasa. Dalam konteks Jambi, peningkatan realisasi investasi, baik PMDN maupun PMA, memiliki dampak atau peran yang penting dalam menciptakan unit-unit usaha baru serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa. Masuknya arus investasi mendorong peningkatan kebutuhan terhadap tenaga kerja lokal, yang pada akhirnya berkontribusi dalam menekan angka pengangguran serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan data sektoral yang memperlihatkan adanya tren kenaikan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan dan jasa dalam kurun lima tahun terakhir.

Sebaliknya, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat diartikan, pengeluaran pemerintah belum cukup kuat dalam menciptakan lapangan kerja secara langsung di sektor-sektor utama. Kemungkinan penyebabnya yaitu komposisi belanja yang mungkin lebih banyak terserap pada belanja operasional dibandingkan belanja modal produktif. Temuan ini konsisten dengan penelitian Mankiw (13), yang menegaskan bahwa belanja pemerintah akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja hanya apabila dialokasikan pada sektor-sektor yang produktif serta padat karya. Jika dikaitkan dengan data sektoral, belanja pemerintah seharusnya berdampak nyata pada sektor-sektor seperti konstruksi, pendidikan, dan layanan publik. Namun, dari grafik distribusi tenaga kerja, sektor konstruksi tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan

dalam penyerapan tenaga kerja. Ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah belum sepenuhnya diarahkan atau dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung sektor-sektor yang bersifat padat karya.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa dalam realitasnya investasi memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi ke depan perlu difokuskan pada dua hal utama. Pertama, memperkuat iklim investasi yang kondusif agar sektor-sektor ekonomi terus berkembang dan menyerap tenaga kerja lokal. Kedua, menata ulang prioritas pengeluaran pemerintah agar lebih banyak diarahkan ke sektor-sektor produktif dan padat karya, seperti pertanian, konstruksi, dan perdagangan, sehingga manfaat belanja pemerintah terhadap ketenagakerjaan bisa lebih optimal.

Tabel 3. Hasil Regresi Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	2	.000	25.743	.037 ^b
	Residual	.000	2	.000		
	Total	.000	4			
a. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL						
b. Predictors: (Constant), PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI						

Penjelasan dari tabel Anova di atas sebagai berikut :

Diketahui Nilai F hitung pada tabel Anova sebesar 25,743 dan nilai F tabel didapatkan

$$(F\{a;K-1;N-K\}) = (F\{0,05;2-1;5-2\}) = (F\{0,05;1;3\}) = 10,128.$$

Jika dibandingkan F hitung > F tabel ($25,743 > 10,13$) yang berarti berpengaruh positif dan signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y yang berarti bahwa hipotesis diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel investasi dan belanja pemerintah memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Jambi pada periode 2020–2024. Temuan ini konsisten dengan teori makroekonomi klasik yang menegaskan bahwa peningkatan permintaan agregat yang salah satunya dipicu oleh aktivitas investasi dan pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan output

nasional sekaligus memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, kedua variabel tersebut terbukti memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Tabel 4. Hasil Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 ^a	.963	.925	.00273
a. Predictors: (Constant), PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI				
b. Dependent Variable: PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL				

Penjelasan dari tabel di atas sebagai berikut :

Berdasarkan tabel di atas, nilai R Square atau koefisien determinasi tercatat sebesar 0,963 atau 96,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X, yaitu Investasi dan Pengeluaran Ppemerintah, mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Y, yakni Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral, sebesar 96,3%, sedangkan sisanya sebesar 3,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Dan Nilai R (Korelasi) Sebesar 0,981% yang berarti bahwa hubungan antara variabel X (bebas) terhadap variabel Y (Terikat) hubungannya sangat kuat atau tinggi.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengolahan regresi linier berganda, diperoleh bahwa variabel investasi bersama dengan pengeluaran pemerintah secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara peningkatan investasi dan pelaksanaan belanja pemerintah mampu memperluas kesempatan kerja di wilayah tersebut.
2. Secara parsial, variabel investasi terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral. Dengan kata lain,

- peningkatan realisasi investasi di Provinsi Jambi berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap.
3. Sementara itu, pengeluaran pemerintah juga menunjukkan pengaruh positif, namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan lapangan kerja sektoral, kemungkinan disebabkan oleh alokasi anggaran yang lebih besar pada belanja operasional ketimbang belanja modal produktif.
 4. Secara keseluruhan, investasi memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan pengeluaran pemerintah dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah ke depan perlu difokuskan pada penguatan iklim investasi dan optimalisasi pengeluaran pemerintah ke sektor-sektor produktif dan padat karya guna meningkatkan efektivitasnya dalam penciptaan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sandika RS, Maulida Y, Setiawan D. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan. 2014;(2):1-16.
2. Andri D, Irmanelly. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI. J Ekon Pembang. 2021;2(1):2798-807.
3. Sukirno S. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2000. 367 p.
4. Prasojo. Kebijakan Publik dan Pemerintahan yang Baik. Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2009.
5. Kusuma H. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. J Ekon Kuantitatif Terap. 2016;
6. Danawati S, Bendesa IKG, Suyana Utama M. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekon dan Bisnis Univ Udayana. 2016;2123-60.
7. Butkiewicz J, Yanikkaya H. Institutions and The Impact of Government Spending on Growth. J Appl Econ. 2011;XIV:319-41.
8. Algifari. Statistika Deskriptif Plus: Untuk Ekonomi dan Bisnis. UPP STIM YKPN; 2010.
9. Badan Pusat Statistik. Provinsi Jambi Dalam Angka 2025 [Internet]. BPS – Badan Pusat Statistik; 2025. Available from: <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/7bfd5dfce1a5976105b05cd4/provinsi-jambi-dalam-angka-2025.html>
10. Badan Pusat Statistik. Ketenaga Kerjaan provinsi, 2020-2024 [Internet].

-
- 2025 [cited 2025 Sep 9]. Available from: <https://jambi.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODM2IzI=/ketenaga-kerjaan-provinsi.html>
11. Irmanelly, Soleh A. Analisis Sektor Unggulan dan Hubungannya dengan Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Provinsi Jambi. J Dev [Internet]. 2013 Jul 22;1(1):15-43. Available from: <https://jurnal.umjambi.ac.id/index.php/JD/article/view/2>
 12. Todaro MP, Smith SC. Economic Development. 12th ed. Harlow: Pearson Education; 2015.
 13. Mankiw NG. Macroeconomics. 2016.